

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, kumpulan dari keluarga akan membentuk suatu lapisan masyarakat dan selanjutnya lapisan-lapisan masyarakat tersebut akan bergabung dalam kelompok besar suatu bangsa. Oleh karena itu baik buruknya suatu bangsa atau negara sangat tergantung kepada pembinaan anggota keluarga dan generasi akan datang.

Peranan wanita sebagai ibu dalam pembinaan keluarga sangat menonjol karena disamping kodratnya untuk mengandung dan melahirkan anak, juga biasanya mempunyai waktu yang lebih lama untuk tinggal dirumah di bandingkan dengan kaum bapak. Dengan kedua faktor pendukung tersebut maka wanita dituntut untuk dapat mengatur kehidupannya, terutama dalam fungsi sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi makanan dalam satu keluarga. Dalam membina keluarga ini, wanita memerlukan bekal pendidikan dan pengetahuan. Perkembangan menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai potensi yang sama besarnya dengan potensi yang dimiliki laki-laki yang karena itu dapat dikerahkan dengan pembangunan. Dengan demikian terlibatnya wanita dalam kegiatan ekonomi berarti wanita demikian telah melakukan fungsi ganda, baik sebagai ibu

Menyadari pentingnya sumbangan kaum wanita, pemerintah telah berusaha memberi peluang untuk mengembangkan kaum perempuan tersebut sejajar dengan laki-laki sehingga tidak ada diskriminasi diantaranya. Bahkan sejak kabinet pembangunan III telah diangkat seorang menteri yang khusus menangani masalah peranan wanita. Dengan secara hukum wanita Indonesia berpeluang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di semua bidang kehidupan. Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membeda-bedakan apakah laki-laki ataupun perempuan, dalam bidang-bidang pekerjaan, kesehatan, politik, dan hukum, serta hak perorangan. Selanjutnya Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988, dalam melaksanakan pembangunan, wanita merupakan mitra sejajar yang mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, serta mempunyai peranan sangat penting dalam keluarga karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas generasi muda dan kesejahteraan keluarga. Wanita, sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan.

Namun dengan adanya Undang-Undang dan peraturan tentang persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita agaknya tidak menjamin kenyataan yang dialami wanita. Kaum wanita dimana-mana masih merasakan

walaupun gemanya mulai surut, menunjukkan adanya hal ini sumber kekurangadilan ini diduga berasal dari faktor-faktor budaya, sistem nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat, cara pandang para pemerintah dan pengambil keputusan terhadap peran dan status wanita, dan wanita masih dilibatkan dengan pengertian bahwa pekerjaan wanita "utama" wanita yakni mengurus rumahtangga, yaitu pekerjaan yang mencakup memasak, mencuci, mengurus anak dan keluarga dan bahkan wanita masih dinilai sebagai pengaruh dari kebudayaan.

Seringkali dikatakan bahwa peranan wanita erat hubungannya dengan kewajiban biologisnya, yaitu mengandung dan melahirkan anak sehingga sejak dari masa kecilpun anak perempuan dididik dan dipersiapkan kelak berperan sebagai ibu atau pengurus rumahtangga.

Pendidikan wanita juga masih simpang siur, seperti dalam bidang pekerjaan, wanita secara hukum memperoleh peluang yang sama besar agar laki-laki untuk mengikuti semua jenjang pendidikan. Kembali di soal norma yang berlaku dimasyarakat Kabupaten Sarolangun di mana wanita belum berpartisipasi secara penuh dalam bidang pendidikan, norma tersebut menyebabkan beberapa orang tua berpendapat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Hal ini tercermin dari lebih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan wanita dibandingkan dengan laki-laki, diharapkan dimasa datang norma tersebut dapat berkurang pada kenyataannya. masih mempunyai pendidikan sangat rendah terutama pada tingkat perdesaan dan

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kelulusan di Kab. Sarolangun
Tahun 2004-2005

No	Lulusan	2004		2005	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	SD	1696	1445	1735	1270
2	SMP	375	343	535	566
3	SMA	79	77	182	162
4	P.T	22	12	109	66
Jumlah		2172	1877	2561	2064

Sumber dari Data Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa, tingkat partisipasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda pada tingkat pendidikan, dilihat pada tabel diatas, pada masa sekarang perempuan lebih mendapatkan tempat di publik walau tidak semuanya dapat dikerjakan oleh perempuan namun masih banyak melibatkan kaum laki-laki, dan ini sudah dapat menunjukkan bahwa sudah ada proses dalam menegakkan hak dan kewajiban perempuan dalam negara.¹

Dan manusia merupakan makhluk tuhan yang mempunyai akal baik, yang mempunyai kedudukan, dibekali akal dan fikiran serta hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam masyarakat, dan perempuan ditakdirkan oleh Alloh SWT sebagai ibu, secara langsung akan membimbing, mendidik, dan mewariskan kemampuan-kemampuannya kepada anak-anaknya, sementara itu secara luas bisa diartikan sebagai pemegang peranan penting dalam pendidikan moral masyarakat. Kaum perempuan boleh berprofesi dalam bidang apapun, termasuk bisnis, dan

berorganisasi, dan seharusnya perempuan perlu melatih dirinya untuk bekerja dan beraktifitas dalam kegiatan apapun yang sekiranya dapat menambah untuk kepentingan pribadinya atau untuk umum. Begitu pula sebagai warga negara Indonesia, wanita seperti halnya pria mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengalami pergeseran atau perubahan dalam setiap kehidupan dengan usaha dan kerja keras mereka, misalnya kesamaan dan kesempatan dalam berpolitik, bernegara, berorganisasi dan sebagainya. Adanya kenyataan bahwa para pemimpin wanita di daerah/kecamatan dan desa/kelurahan mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Ada beberapa wanita yang menempati jabatan strategis di Kabupaten Sarolangun.

Tabel 1.2
Perempuan yang menduduki jabatan strategis di Kab.Sarolangun

No	Nama	Jabatan	Daerah Kerja
1	Siti Zahra	Kepala Desa	Desa Simpang Nibung, Kec. Singkut
2	Rusmini	Kepala Desa	Desa Jati Baru, Kec. Mandiangin
3	Diana	Kepala Desa	Desa Muaro Ketalo, Kec. Mandiangin
4	Siti Aminah	Kepala Desa	Desa Butang Baru, Kec. Mandiangin
5	Dra. Heldiana	Kepala Dinas. BPPKB	
6	Susi Aprianti. SP	1. Ketua Komisi (B) DPRD Kab. Sarolangun. 2. Menjabat Ketua Partai PAN Kab. Sarolangun.	Kab. Sarolangun. Kab. Sarolangun.
7	Susi Novianti	Wakil Direktur RSU	Kab. Sarolangun
8	Dra.Mutia Ambiar	Ketua Partai Golkar di Kab. Sarolangun	Kab. Sarolangun
9	Lenggana. S. SE.	Anggota Dewan DPRD	Kab. Sarolangun

hal sangat penting bagi mereka, yaitu hak yang sama dalam segala bidang tanpa ada batasan untuk setara.

Kepentingan mereka bukan hanya sebatas itu, ini adalah realitas sosial yang masih sangat banyak dijumpai di masyarakat pada tingkatan bawah. Kondisi yang dialami oleh kaum perempuan juga diperparah dengan adat istiadat yang mengharuskan mereka hanya mengurus kepentingan rumah, dalam pertemuan-pertemuan mereka tidak memiliki hak bersuara atau mengeluarkan pendapat mereka terhadap permasalahan yang terjadi. Selain itu, dapat kita lihat kaum laki-laki juga serasa tidak digeser kedudukannya, karena yang mereka alami sudah nampak mapan dalam di dunia politik. Sangat terlihat dalam setiap kesempatan kaum laki-laki, tidak mau memberikan tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam segala bidang kegiatan atau organisasi. Sehingga sering terjadi kepentingan dari kaum perempuan dalam berorganisasi, seperti terkesampingkan dan tidak mendapat porsi yang adil. Hal ini mungkin saja bisa terjadi, dikarenakan dari kaum perempuan sendiri sudah merasa nyaman dengan kondisi yang mereka alami sekarang ini. Dalam proses demokrasi ini sangat diperlukan akan adanya kesetaraan gender, agar tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Jika ketidakadilan gender sudah terjadi, seperti kondisi yang dialami kaum perempuan seperti sekarang ini, tentu saja akan menghambat demokratisasi yang sedang berjalan di negeri ini.

Dengan pergantian kekuasaan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto

telah terjadi banyak peristiwa yang membuat negara ini berubah diri dimulai

dari pembagian kekuasaan (menunjuk dan mengangkat aparatur pemerintahan) untuk menjalankan roda pemerintahan. Rezim Soeharto atau yang lebih dikenal dengan rezim Orde Baru ini telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun selama itu pula perempuan-perempuan di Indonesia tidak bisa menyuarakan aspirasinya karena organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan masih sangat sedikit dan susah untuk berkembang karena sistemnya masih dikontrol oleh pusat sehingga kegiatannya hanya sebatas lingkup perempuan itu sendiri. Pada masa Orde Baru muncul beberapa organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan antara lain Dharma Wanita, PKK, dan semua organisasi tersebut bertujuan untuk mendukung kekuasaan Soeharto. Dengan adanya organisasi tersebut Soeharto lebih mudah mengontrol dan memobilisasi, masyarakat yang ada dipusat sampai daerah. Pada saat itu hanya Golkarlah yang memiliki akses ke masyarakat sampai tingkat bawah (desa) dengan melalui aparatur birokrasinya (kepala desa). Mau tidak mau perempuan indonesia telah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, dan ini tidak dapat dipungkiri lagi. Jika kita melihat lintasan sejarah bangsa Indonesia maka akan kita dapati berbagai peran penting yang telah dimainkan kaum perempuan baik dalam pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Orde Baru menjadi tonggak yang penting dalam menentukan pasang surut gerakan perempuan di Indonesia. Dengan kekuasaannya rezim ini telah memberangus dan mengkooptasi gerakan-

dan perempuan yang bermunculan pada masa sebelum Orde Baru

Organisasi-organisasi independent disatukan dalam satu wadah yang disebut KOWANI (Korps Wanita Indonesia) tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang jauh dari persoalan-persoalan politis; istri-istri pegawai negeri disatukan dalam Dharma Wanita; istri-istri TNI disatukan dalam satu payung organisasi Dharma Pertiwi; sedang perempuan di level bawah (kecamatan sampai desa) diberikan wadah PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Peran PKK sangat penting bagi pemerintah karena merupakan penengak utama antara negara dan wanita desa. PKK bahkan bertugas untuk mensukseskan program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pemerintah secara tegas menyebutkan bahwa PKK berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha pembangunan. Bahkan dalam struktur organisasi berada di bawah naungan departemen dalam negeri, dan ketuanya di tingkat desa adalah istri kepala desa. Program-programnyapun disesuaikan dengan kepentingan ideologis negara yang tertuang dalam 10 program pokok PKK yaitu; 1) Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 2) Gotong Royong, 3) Sandang, 4) Pangan, 5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, 6) Pendidikan dan Ketrampilan, 7) Kesehatan, 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, 9) Kelestarian Lingkungan Hidup, 10) Perencanaan Sehat.⁴

Pada saat Pemerintahan Orde Baru ada semacam “kewajiban” dari negara bahwa perempuan harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, yaitu kegiatan organisasi PKK, dan organisasi-organisasi perempuan lainnya,

organisasi PKK berpengaruh juga pada tingginya angka partisipasi perempuan dalam organisasi PKK. Keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi PKK bukan karena keinginan pribadi, dan bukan karena kebutuhan mereka namun lebih dikarenakan instruksi. Selain PKK, kegiatan-kegiatan lain yang diikuti sebagian besar juga bersifat homogen keanggotaannya dan kegiatan-kegiatannya bersifat sosial keagamaan yang jauh dari proses-proses politik (pengambilan keputusan). Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kelompok doa didominasi oleh ibu-ibu. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perempuan cukup aktif dalam aktivitas-aktivitas publik namun bukan dalam ruang-ruang yang pengambilan keputusan publik yang menyangkut kepentingan-kepentingan umum termasuk dirinya.

Organisasi-organisasi tersebut merupakan lembaga yang dibuat khusus untuk perempuan, memberikan wadah bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Jika dilihat dari institusi-institusinya yaitu PKK, Arisan, Pengajian/ Persekutuan Doa dan lain-lain menggambarkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut bersifat sosial dan keagamaan, yang dianggap jauh dari urusan-urusan politik. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa masalah politik bukan masalah perempuan. Perempuan dianggap kurang pantas terlibat dalam politik.

Nampaknya pemerintah Orde Baru sangat berhasil menjauhkan perempuan dalam aktivitas-aktivitas politis dengan memberikan perempuan

dan untuk melakukan aktivitas publik melalui PKK dan arisan. PKK merupakan

satu-satunya organisasi perempuan *grass root* di tingkat RT/ kelurahan yang resmi atau sah diakui oleh pemerintah dan mendapatkan dana dari pemerintah meskipun jumlahnya sedikit. Melalui organisasi ini pemerintah Orde Baru bisa mengontrol kegiatan-kegiatan perempuan sampai tingkat bawah (RW) sekaligus menyukseskan program-program pemerintah. Melalui program-programnya perempuan “dijinakkan”, dijadiakn volunteer dan didomestikasikan.

Kebijakan ini bertujuan agar perempuan mudah dikontrol dan menjauhkan perempuan dari aktifitas politik. Rezim Orde Baru menggunakan organisasi-organisasi perempuan bentukannya untuk mensukseskan program-program “pembangunannya” yang sekaligus strategi untuk melanggengkan kekuasaan.

Dalam setiap kebijakan yang dibuat, pemerintah Orde Baru mendikotomikan peran bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditempatkan dalam posisi publik sementara perempuan dalam posisi domestik. Aktivitas publik terutama dunia politik formal adalah dunia laki-laki. Secara tegas, kebijakan tersebut dicanangkan dalam Panca Dharma Wanita yaitu:

1. wanita sebagai pendamping suami
2. wanita sebagai penerus keturunan
3. wanita sebagai pendidik anak
4. wanita pencari nafkah
5. wanita sebagai warga masyarakat⁵

Bagi banyak pihak terutama kaum feminis melihat bahwa perjuangan Dharma Wanita selama ini hanya sebatas memperjuangkan haknya sebagai istri pegawai negeri saja, dan bukan kepentingan perempuan. Secara sadar atau tidak sadar Dharma Wanita telah mereduksikan diri menjadi perjuangan seksual (tidak melihat perbedaan jenis kelamin), lemah kekuasaan serta istri-istri yang bergantung secara ekonomi-politik kepada suami dan kekuasaan negara. Hal ini bisa diartikan secara gamblang bahwa Dharma Wanita telah ikut juga melestarikan budaya patriarki⁶.

Organisasi-organisasi perempuan yang ada tidak lebih sebagai tangan panjang pemerintah Orde Baru untuk mensukseskan program-programnya, karena dengan adanya organisasi-organisasi perempuan maka pemerintahan pada masa Orde Baru dapat memperbesar suaranya dalam pemerintahan. Konsep pembagian kerja yang memosisikan laki-laki di wilayah publik dan perempuan di wilayah domestik diadopsi oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakannya. Wujudnya muncul dalam praktek-praktek peminggiran secara sistematis terhadap partisipasi perempuan yang berupa pembentukan organisasi-organisasi “untuk perempuan“ sampai di tingkat akar rumput, organisasi istri dan penyatuan organisasi-organisasi independent sehingga mudah dikontrol oleh pemerintah. Perempuan merupakan supporting dalam pada masa pemerintahan Soeharto, untuk mendukung rezim yang berkuasa dan dimobilisasi dalam pemilihan umum serta mendukung program-program pemerintah demi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas publik. Dampaknya,

organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian kekuatan masyarakat sipil tidak berkembang dan semakin didomestikasi.⁷

Sedangkan pada masa reformasi ini perempuan lebih mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam segala bidang publik, politik maupun organisasi kemasyarakatan, dari masa orde baru hingga masa reformasi organisasi PKK mengalami pergeseran yang dapat dibilang bergeser pada pola yang lebih terkonsep dan baik.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan (PKK). Keberadaan PKK dalam era reformasi saat ini sangat penting karena PKK merupakan wadah bagi para perempuan dalam keikutsertaan melaksanakan amanat reformasi dan PKK adalah salah satu wadah yang dapat dijangkau oleh kaum wanita dari kalangan bawah hingga atas dan tanpa batasan.

Dalam era reformasi seperti sekarang ini banyak organisasi dituntut untuk lebih bisa mengembangkan diri dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama bagi kaum yang paling banyak menurut jenis kelamin di dunia ini yaitu perempuan. Organisasi yang bisa merambah kaum perempuan sampai ketinggian yang paling rendah adalah organisasi PKK (Pembinaan

Kemiskinan dan Ketertinggalan). Dengan PKK dalam pemberdayaan perempuan dan

lebih mengarahkan perempuan pada posisi yang tidak termarginalkan, dan peran PKK sangat besar terutama dalam bidang kesejahteraan keluarga, perempuan tidak hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga yang kerja mengurus keluarga saja, tetapi perempuan bisa membantu perekonomian. Dalam hal ini PKK memegang peranan yang sangat penting karena dari PKK tersebut ibu-ibu rumah tangga diberi pelatihan tentang bagaimana cara meningkatkan derajat ekonomi keluarga.

Di era reformasi seperti saat ini perempuan dituntut untuk lebih kritis dalam menyikapi perkembangan zaman. Perempuan dituntut untuk bisa sederajat dengan laki-laki dan bahkan bisa lebih dari laki-laki dalam konteks partisipasi diberbagai bidang yang sering ditempati oleh laki-laki tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai istri yang baik bagi suami. Dari sini dapat dilihat bahwa pada era reformasi ini kaum perempuan lebih mendapat tempat yang layak dan sudah mendapatkan perhatian baik dari pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang bergerak pada bidang perempuan ataupun lembaga yang ingin memberdayakan kaum perempuan. Pada era reformasi ini juga dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan organisasi PKK tidak hanya terpaku pada 10 Program Pokok saja, melainkan organisasi PKK era reformasi sudah mendapatkan kebebasan dalam pengembangan segala kegiatan dalam berbagai bidang. Sehingga disini dapat ditarik pengertian bahwa pada Era Orde Baru organisasi PKK masih dikontrol dari pemerintah pusat baik dari

kegiatan-kegiatan organisasi PKK tidak boleh lepas dari 10 Program Pokok tersebut

sedangkan pada Era Reformasi ini organisasi PKK lebih mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk lebih mengembangkan kegiatannya, kegiatan tambahan yang dapat membantu proses pelaksanaan, dan tidak melupakan 10 Program Pokok PKK.

Masih rancunya format pemberdayaan perempuan dalam berbagai hal, kebijakan *women in development*, misalnya yang menjadi kerangka pemberdayaan perempuan belakangan ini diperbaharui dengan pola *women and development*, yang menetapkan perempuan sebagai bagian dari pemanfaatan secara utuh. Disini perempuan sebagai bagian dari pembangunan secara utuh. Disini perempuan ditantang untuk mampu berpacu secara elegan dengan laki-laki yang secara dominan masih minim kesadaran gendernya. (*Perempuan Politik di Parlemen. 2001:23-25*).

Ada yang menarik apabila kita melihat lagi kebelakang, bahwa masih terdapat salah satu ketimpangan dan diskriminasi gender di negara kita di indonesia, yaitu proses terpilihnya K. H. Abdurrahman Wahid merupakan hasil rekayasa politik. Hasil pemilihan umum 1999 yang merupakan hasil pesta rakyat yang paling demokratis menunjukkan bahwa partai pimpinan Megawati harus memperoleh suara terbanyak, namun akibat berbagai rekayasa politik, Megawati harus puas hanya menjadi Wakil Presiden. Sementara K. H. Abdurrahman Wahid, dengan perolehan suara 11 persen dari partai yang didirikannya, akhirnya menjadi orang nomor satu di negeri ini. Hal ini disebabkan oleh menguatnya arus kelompok partai-partai islam plus

Call... dan... maka... Megawati tidak sampai menjadi

presiden karena ada persoalan ” perempuan ”. Namun dibalik itu semua, ada yang perlu diperhatikan pada waktu itu, yaitu kedudukan Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus sebagai Wakil Presiden RI memberikan semangat dan warna tersendiri bagi kaum perempuan dan aktivis perempuan dalam kancah politik di Negara kita Indonesia. Apalagi tidak berleumpang lama, periode K. H. Abdurrahman Wahid pun berakhir, dan saat itu pula Megawati menjadi orang nomor satu di Negara kita. Dan hal tersebut merupakan semangat baru serta memiliki nilai tersendiri bagi kaum perempuan dan para aktivis perempuan, bahwa dari kaum mereka juga dapat menjadi pemimpin.

Terlepas dari permasalahan diatas, transisi politik di Indonesia yang bergulir sejak terpilihnya K. H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden memberikan nuansa baru dalam proses pemberdayaan perempuan. Tidak saja karena tetap dipertahankannya Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai salah satu Kantor Menteri Negara, tetapi faktor kebijakan pemerintah dalam berbagai upaya dalam pemberdayaan perempuan. Di saat gencarnya proses pemberdayaan perempuan, baik LSM dalam maupun luar negeri ataupun oleh partai tertentu, banyak kebijakan Kantor Meneg PP yang dipandang sangat membela sikap otonom perempuan. Sebut saja misalnya penolakan substansi UU Perkawinan tentang poligami, pembelaan terhadap hak-hak buruh perempuan yang dianiaya di luar negeri, pemberlakuan kuota perempuan dalam berbagai jabatan publik, baik

kelembagaan maupun eksekutif, serta pembelaan terhadap siguri hamil untuk tetap

bisa melaksanakan tugas belajarnya merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan perempuan.

Upaya pemberdayaan perempuan harus terus digalakkan, begitu pula peningkatan pendidikan, keterampilan, pelatihan yang menjadi tanggung jawab tidak saja sosial, organisasi wanita, masyarakat umum, tetapi juga partai politik sebagai suatu organisasi politik dan sarana politik. Politik di era reformasi harus diartikan sebagai partisipasi yang lebih besar dari masyarakat termasuk perempuan representasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, partisipasi perempuan sangat penting dalam proses kearah membangun demokrasi di indonesia yang tidak mengenal adanya diskriminasi terhadap perempuan. Potensi wanita yang menurut penelitian mempunyai sikap politik yang mementingkan keadilan anti kekerasan dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka (etika moral yang baik). Jika mereka diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, niscaya wajah politik dan organisasi-organisasi di indonesia akan lebih berwarna juga akan bergeser.

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan sesuatu yang diinginkan oleh seluruh kaum perempuan tanpa terkecuali. Perempuan menuntut hak yang sama dengan laki-laki dengan organisasi PKK inilah perempuan menunjukkan kemampuannya bahwa perempuan bisa seperti laki-laki dalam bidang ekonomi dan bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Disinilah peran PKK sangat besar dalam era reformasi PKK

Rendahnya partisipasi perempuan dalam segala bidang pada masa itu, menjadikan perempuan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana persepsi perempuan yang terkesampingkan. Kondisi ini dijadikan senjata bagi kaum laki-laki untuk semakin memarginalkan (Proses pemiskinan ekonomi) perempuan dalam segala bidang kegiatan. Dalam kenyataannya PKK sangat membantu dalam memberdayakan masyarakat terutama para kaum perempuan, karena PKK mempunyai program-program yang dapat memberikan pengaruh positif kepada kaum perempuan, sebenarnya dari sinilah para kaum perempuan yang hanya aktif dirumah (hanya menyandang status ibu rumah tangga), dengan mereka mengikuti kegiatan organisasi PKK, ini sangat membantu mereka setidaknya untuk mengenal kegiatan apa saja yang terdapat dalam organisasi, dan dapat mengetahui susunan organisasi yang mungkin sebelumnya mereka kurang faham dan bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Dan dari sinilah mereka mulai aktif dengan segala kegiatan yang terdaftar pada program PKK dan mereka para kaum perempuan aktif dan tidak pasif lagi, dengan adanya pengkaderan program-program yang ada PKK dapat mensosialisasikan kepada kaum perempuan bahwa walau hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi mereka dapat ikut berpartisipasi dalam organisasi akar rumput yang banyak memberikan pengalaman mereka baik dalam berorganisasi dan aktif dalam segala hal kegiatan. Hal nyata dalam pemberdayaan kaum perempuan melalui kegiatan organisasi PKK adalah dalam hal pembelajaran ketrampilan dan sistem partisipasi kaum perempuan

organisasi PKK tidak terdapat dalam kelurahan saja tetapi ada PKK tingkat RT dan RW. Pemberdayaan dalam hal pemanfaatan sumber daya manusianya.

Masalah tentang pemberdayaan terhadap perempuan terjadi dan ada semenjak para perempuan menyadari hak dan kewajiban mereka baik sebagai individu maupun sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat dalam suatu tatanan dunia yang semakin modern dan konsen dengan kesetaraan gender.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.⁸

Dalam kenyataannya ada tiga konsep Pendekatan Gender dalam pembangunan, yang mana setiap konsep tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan, namun ini adalah salah satu langkah awal pada tingkat dunia antara lain:

1. Women in Development

Pemikiran tentang perempuan dalam proses pembangunan tampak berjalan ke arah yang berbeda. Pendekatan gender mulai dipakai dalam pembangunan ketika konsep *Women in Development* (WID) menjadi

⁸ *Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, Surabaya, 2007, hal. 1

bagian dari diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga. Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di negara berkembang. Pendidikan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang baik, lebih cepat, yang akan meringankan beban bekerja dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, dengan adanya peningkatan teknologi berkaitan pada pemiskinan perempuan, misal saja menghilangkan cara panen padi dengan menggunakan ani-ani oleh tenaga wanita.

Modernisasi yang dilakukan merupakan model tentang bagaimana perekonomian “terbelakang” melalui perangkat industrialisasi, urbanisasi, transfer teknologi, bantuan keuangan, dan penyatuan perekonomian Dunia Ketiga ke dalam sistem pasar kapitalis.⁹ Menurut pendekatan ini, perempuan diabaikan, atau dilihat sebagai bagian dari rumah tangga atau komunitas, atau mereka adalah obyek kesejahteraan. Kenyataan bahwa pendekatan kesejahteraan yang meletakkan perempuan sebagai sasarannya merupakan persepsi hasil khusus tentang perempuan. Kesejahteraan ini juga meliputi banyak jenis pembangunan yang sudah sangat dikenal-program kesehatan ibu-anak, skema pemberian ASI, pelayanan KB, bantuan program, dan sebagainya. Program kesejahteraan masih sangat populer sebagai cara untuk menjangkau perempuan, kendati tidak banyak memberi sumbangan, jika ada, dalam menciptakan kemerdekaan dan

⁹ L. H. Glass-Morse, *Gender dan Pembangunan: Perspektif Belgia*, Yogyakarta, 2007, Hal. 208.

kemandirian. Malahan, program tersebut “aman” secara politik dan tidak mempersoalkan status quo dalam pengertian nilai, status ekonomi (khususnya akses dan kontrol yang tidak sama atas sumber daya), atau pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang telah mapan. Program tersebut lebih disukai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang mencemaskan penegakkan nilai-nilai kultural dan sosial. Setelah lebih kurang sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsikan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. Sejak tahun 1970-an tampak jelas bahwa strategi modernisasi tidak berhasil menghapus kemiskinan.¹⁰ Penghapusan kemiskinan dengan berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial memerlukan keterlibatan perempuan. Ada anggapan bahwa kemiskinan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang sama dan partisipasi yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengeluarkan perempuan dari jerat feminisme kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan gender yang praktis dan strategis. Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan yang segera meringankan beban kehidupan perempuan, tetapi tidak menyinggung letak kesejajaran perempuan, pembagian kerja secara seksual ataupun kesejajaran antara gender. Kebutuhan-kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang menihilkan ketidakseimbangan gender di dalam dan di

luar rumah tangga serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis tersebut dapat di gunakan salah satu alternatif pendekatan dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan. Berbicara tentang pemberdayaan tidak terlepas dari proses pembangunan, indonesia sendiri dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam sektor pembangunan ini, juga telah lama berproses. Awalnya tahun 1980-an pendekatan pembangunan yang digunakan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan kesetaraan Gender yang disepakati oleh penduduk dunia. Konsep yang dipilih adalah *Women In Developmen* (WID) yang berpandangan bahwa banyak pengaturan yang tidak menyertakan perempuan dalam pembangunan sebagian bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Absennya perempuan ini menjadikan mereka termaginalkan dalam berbagai perubahan yang diakibatkan pembangunan. Kemudian WID dikritik, karena WID tidak dapat menjawab hubungan kuasa yang terjadi dalam masyarakat, atau dapat diartikan juga bahwa WID dianggap sebagai penyebab keterbelakangan wanita adalah karena wanita tidak berpartisipasi dalam pembangunan, pertanyaan mendasar yang dilontarkan terhadap konsep WID adalah jika perempuan dan laki-

keduanya berkompetisi dalam posisi yang seimbang tentunya dalam sistem yang timpang.¹¹

2. *Women and Development*

Women and Development (WAD) merupakan salah satu feminisme neo marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970-an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. WAD mengemukakan gagasan tentang persamaan, dan menjadikan persamaan sebuah kriteria penting bagi pemikiran tentang apa yang dibutuhkan perempuan dari pembangunan. Pendekatan ini mengidentifikaasi asal usul subordinasi perempuan berada tidak hanya dalam konteks keluarga, melainkan pula dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di sektor publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka, sehingga seharusnya perempuan ada pengakuan terhadap nilai ekonomi kerja perempuan yang dibayar atau tidak dibayar. Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini, pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari struktur ideology dan struktur patriarki. Pendekatan WAD cenderung

menitik beratkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Dampak yang kemudian timbul adalah beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan, karena dengan teori ini wanita dituntut untuk mengurus rumahtangga dan keterlibatan wanita dalam partisipasi ekonomi.

3. *Gender and Development*

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan-kerja produktif, reproduktif, privat dan publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan” atau secara lebih umum, pendekatan *Gender and Development* (GAD) terhadap perempuan dalam pembangunan. Pendekatan pemberdayaan berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam analisisnya terhadap asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan ini berniat mengubah posisi perempuan negara berkembang. Proses perubahan, dan pengaruhnya atas kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunannya, seiring sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri. Pendekatan ini juga yang memperkenalkan mekanisme partisipasi dan jejaring dimana semua kegiatan pembangunan persektif gender sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pemikiran

berusaha mewujudkan relasi yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Konsep pengarusutamaan gender ini kemudian diterjemahkan pemerintah Indonesia ke dalam bentuk strategis kebijakan untuk mengaplikasikan gender ke dalam setiap pembangunan.¹² Konsep gender, tidak hanya sekedar memperbaiki status wanita, tetapi yang lebih penting lagi adalah diperlakukannya perubahan peran baik pria dan wanita, yang tidak mendominasi satu kepada lainnya. Yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang selaras, harmonis, saling mendukung dan saling mengisi antara pria dan wanita. Dengan demikian dalam konsep yang terakhir ini, pokok perhatiannya adalah ada atau tidak adanya ketimpangan, ketidakadilan yang menimpa wanita ataupun pria. Usaha untuk menghilangkan ketimpangan itu hanyalah mungkin apabila pria dan wanita mampu berjalan bersama sebagai mitra sejajar.¹³

Setelah mengetahui bagaimana perkembangan pemberdayaan perempuan melalui WID, WAD dan GAD, dan kemudian bagaimana ketiga peranan tersebut mempengaruhi organisasi perempuan Indonesia dalam pemberdayaan kaum perempuan, baik dilihat dari segi pendidikan, sosial, dan ekonomi, *pertama* dalam kenyataannya pemberdayaan kaum perempuan terutama pada organisasi PKK (khususnya di Kabupaten Sarolangun) dapat dilihat dari tiga segi tersebut, pemberdayaan kaum perempuan dalam organisasi PKK pada bidang pendidikan, pada kenyataannya pendidikan merupakan arah pemberdayaan yang sangat

¹² *Ibid*, hal.208 - 214

¹³ *Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengembangan PSW UGM Yogyakarta*

penting, baik untuk modal untuk berorganisasi atau ikut pengambil kebijakan pada tingkat tertentu, peran organisasi Tim Penggerak PKK dalam memberdayakan kaum perempuan sangat terlihat, misal saja pada bidang pendidikan, dengan rendahnya kualitas pendidikan pada kaum perempuan, organisasi PKK Kabupaten Sarolangun membuat perpustakaan kecil, yang tujuannya sebagai tolak ukur dan memberikan semangat kaum perempuan untuk mau meningkatkan pola pendidikan karena dengan membaca berarti membuka jendela dunia. Yang *kedua* dari segi sosial masyarakat sudah dapat berinteraksi dan mampu mengukur begitu pentingnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan partisipasi kaum perempuan tidak diragukan lagi, karena dengan adanya tingkat kemauan mereka terlibat dalam organisasi PKK tersebut sudah dapat dibuktikan tingkat sosial mereka. *Ketiga* pada tingkat ukur ekonomi, mayoritas kaum perempuan di kabupaten sarolangun terutama pada tingkat desa kaum perempuan banyak yang beraktivitas diluar rumah, karena tempat mereka diladang, atau diperkebunan karet dan sawit, untuk saat ini tingkat ekonomi mereka tidak dapat dikatakan lebih, tetapi dengan adanya keterampilan dan bekal dari home industri kaum perempuan mampu menambah ekonomi mereka baik dari hasil keterampilan individu maupun kelompok. Dan dari sini dapat dilihat peran Organisasi PKK mampu memberdayakan perempuan kedalam pembangunan walaupun semua itu terwujud dari pembangunan keluarga, disini dapat dilihat bahwa peran

pembangunan, menuju ke konsep *Gender and Development* (GAD). Walaupun organisasi PKK Kabupaten Sarolangun belum berjalan efektif dalam pemberdayaan perempuan namun usaha PKK tetap untuk memberdayakan nasib kaum perempuan pada kalangan bawah.

Dengan adanya permasalahan tentang pemberdayaan perempuan yang selama ini terpinggirkan maka organisasi PKK Kabupaten Sarolangun merasa terpanggil untuk turut terlibat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebagai ciri dari PKK, yakni selain menjalankan 10 program pokoknya, organisasi PKK tidak lupa juga ikut membantu memberdayakan perempuan yang selama ini terpinggirkan, dan PKK juga terlibat dalam membantu memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan terpinggirkan. Tim Penggerak PKK di Kabupaten Sarolangun juga belajar untuk meningkatkan pemberdayaan peran perempuan walau semua belum berjalan sempurna, setidaknya sebagai kabupaten yang baru atau Kabupaten pemekaran, organisasi PKK mampu ikut serta didalamnya.

Akan tetapi dalam perjalanannya, organisasi PKK ini mengalami banyak permasalahan yang membuat organisasi ini kurang mampu berkembang di kabupaten Sarolangun seperti kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam mengelola organisasi, tumpang tindihnya tugas dan wewenang. Masalah dengan organisasi PKK di Kabupaten Sarolangun adalah, banyaknya masyarakat terutama kaum perempuan ditingkat desa yang belum mengetahui betul bagaimana sistem organisasi,

memberikan sebuah pembelajaran yang berkelanjutan, dan proses pensosialisasian ini pantas diberikan Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten dalam penyuluhan atau sosialisasinya kepada organisasi PKK tingkat desa, dan disini yang harus difahami adalah bagaimana memberikan arahan kepada anggota PKK, dari tingkat desa dalam upaya memahami tugas dan wewenang pengurus organisasi PKK, apabila dilihat dari peran serta masyarakat terutama kaum perempuan ditingkat desa untuk mengarahkan dan memberikan pengertian tugas dan wewenang pengurus PKK, bukan merupakan hal yang mudah, disini dapat dilihat para anggota dari desa biasanya hanyalah kaum perempuan ibu-ibu yang hanya menjabat sebagai ibu rumah tangga, dan rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya sebatas sekolah dasar atau sekolah rakyat pada masanya, walaupun ada yang lulusan SMP, SMA namun hanya beberapa saja, dan tidak banyak yang mempunyai pendidikan di atas sekolah dasar, dari sini dapat dilihat dan difahami bukan perkara mudah untuk memberikan arahan bagaimana memberikan penjelasan dan pelatihan bahkan pendidikan untuk mengetahui bagaimana peran seorang perempuan dalam bekerja di sebuah organisasi seperti PKK tersebut baik dalam mengurus dan dalam hal pengambilan keputusan sebagai pengurus, karena didalam PKK ada beberapa tugas dan wewenang pengurus yang wajib dipatuhi dan dijalankan, apabila keterlibatan mereka tidak diawali dengan pendidikan pemahaman tugas dan fungsi sebagai pejabat dalam

... PKK ditingkat desa, maka organisasi PKK tingkat desa tidak

akan berjalan dengan baik, karena dengan memahami tugas dan kerja mereka berarti sudah termasuk pembelajaran pengenalan kepengurusan. Dengan proses ini kegiatan organisasi PKK tingkat desa dapat berjalan dengan baik walaupun para pengurus dan pemegang kekuasaanya adalah para ibu-ibu yang bisa dikatakan tingkat pendidikannya rendah, dengan adanya pensosialisasian Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun, dalam pemberdayaan dan pengetahuan tentang kepengurusan setidaknya dapat memberdayakan mereka. Dan pemberdayaan perempuan dalam bidang home industri dan keterampilan-keterampilan yang sifatnya dapat membangun, dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang diadakan organisasi PKK Kabupaten Sarolangun dengan tidak melupakan 10 program PKK.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Organisasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun antara lain : melaksanakan dan mematangkan 10 program PKK(di Kabupaten Sarolangun masih menggunakan 10 program pokok PKK), meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat, mengadakan pelatihan Ketua TP PKK kabupaten hingga desa, kegiatan Studi Banding PKK ke Kalimantan Selatan dalam mempelajari PKK didaerah lain, sosialisasi Konsep Gender Ruang Lingkup Program Bagian Pemberdayaan Perempuan, pembinaan secara berjenjang pengurus PKK Kabupaten ke Pengurus PKK Kecamatan dan Pengurus PKK Kecamatan sampai ke Tingkat Desa, Bekerja sama

dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam mengembangkan Batik Motif

Sarolangun dan Batu Aji untuk memasarkan hasil-hasil kerajinan masyarakat, Pelatihan Kader Home Industri dan Pelatihan Keterampilan Bordir, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Kepribadian.¹⁴ Selain itu dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan organisasi TP PKK Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam pemberdayaan Perempuan, dalam mensukseskan kegiatan tersebut tak lupa juga peran laki-laki masih menjadi peran penting dalam memberikan dukungan dalam segala hal, baik itu motivasi dan dukungan semangat untuk kaum perempuan dalam mensukseskan program-program organisasi PKK.

Dan di era sekarang ini, saatnya bagi kelompok perempuan dimanapun posisinya dan apapun jabatannya yang disandangnya untuk berbuat sesuatu melakukan aktivitas pemberdayaan kualitas perempuan. Terkhusus bagi mereka-mereka yang berada di posisi politik, era sekarang ini merupakan momentum terbaik untuk semaksimal mungkin membuat berbagai kebijakan politis yang menciptakan suasana politik elegan, adil dan demokratis, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Namun kita menyadari bahwa sebagai kegiatan yang bertujuan baik senantiasa mengalami berbagai hambatan yang beragam. Pemberdayaan perempuan politik sering tersandung dengan ganjalan atau hambatan, baik yang bersifat internal dalam diri perempuan maupun hambatan eksternal, yaitu dari lingkungan tempat perempuan itu berada. Dan upaya pemberdayaan

¹⁴ D. A. Aji Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun 2007, hal. 40.

perempuan saat ini lebih terlihat, walau masih dalam tahap yang kurang maksimal, pada perkembangannya di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Organisasi PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesehatan dan Keterampilan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2006-2007 ?
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung organisasi PKK dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran organisasi PKK dalam pemberdayaan perempuan di dalam segala bidang, baik dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan keterampilan dalam hal memberdayakan perempuan.
2. Membuka wawasan baru, menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah pemberdayaan perempuan.
3. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam menerima penyuluhan tentang betapa pentingnya kesehatan dan keterampilan dalam rangka kesejahteraan

4. Melatih dan menjadikan kaum perempuan yang multitalen dan berdayaguna tinggi baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas.
5. Untuk mengetahui apakah ada pergeseran organisasi PKK dari masa Orde Baru ke masa Reformasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kaum perempuan untuk lebih meningkatkan perhatian mereka terhadap masalah-masalah perempuan, baik dalam mensejahterakan keluarga dan sekaligus berperan dan terlibat langsung dalam organisasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dari kaum perempuan dan mampu ikut terlibat dalam organisasi-organisasi yang berada dalam level atas atau pun dalam taraf bawah.
2. Sebagai sumbangan umum karena dalam penelitian terdapat hal-hal yang ditemui atau sesuatu yang belum dapat diketahui sebelumnya sehingga dapat menambah wawasan memperkaya pengetahuan dan pengalaman.
3. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan sosial.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Unsur yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah teori, dengan teori inilah penyusun akan mencoba menerangkan fenome sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.

Teori menurut Koentjaraningrat:

“Pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”¹⁵.

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan yang sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut dapat diuraikan landasan teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia Kontemporer artinya sebagai berikut:

” Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁶

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

” Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode - metode penelitian masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 9

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press

Menurut Ralph Linton tentang peranan menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama, yaitu:¹⁸

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari pandangan diatas dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu atau organisasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.

Peranan juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seorang yang mempunyai kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*)¹⁹ merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut sudah menjalankan

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988, hal. 667

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 146

¹⁹ Soejono Soekanto, *Memahami Ilmu Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 35-36

peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Peran atau peranan merupakan perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:²⁰

a. Peranan ideal

Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, peranan ideal tersebut dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Peranan ini merupakan hal yang individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seseorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskannya sendiri) dia harus melaksanakan peranannya tertentu. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda dengan peran ideal yang diharapkan oleh masyarakat.

c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan

Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu, di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri secara aktual senantiasa

²⁰ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, Hal

dipengaruhi oleh sistem kepercayaan harapan-harapan persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta merealisasikan dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan.

2. Organisasi Kemasyarakatan (PKK) Dalam Bidang Kesehatan dan Keterampilan

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yaitu suatu gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. PKK tidak hanya terdapat pada tingkat kabupaten tetapi pada tingkat, PKK tingkat wilayah, desa, dan RT dan RW. Yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keluarga yang tata kehidupannya diliputi oleh rasa saling pengertian, tenggang rasa kegotong royongan dalam suasana

kekeluargaan yang harmonis, merasa keamanan dan ketertibannya terjamin, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga yang baik dan insan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Untuk melaksanakan kegiatan dan program-programnya di dalam gerakan PKK terdapat Tim penggerak PKK. Tim Penggerak PKK adalah, unsure pimpinan, pembina, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak PKK pada masing-masing Tingkatan Pemerintahan. Pentingnya gerakan PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) menjadi gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai pelopornya menjadi kegiatan yang sangat penting, anatra lain yaitu dengan dicantumkannya dalam Ketetapan MPR: Tap. MPR-RI No II Tahun 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Bab IV butir 10, tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa, mengandung 7 esensi pokok:

- a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam proses pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat mulai dari lingkunagn keluarga dan peranannya dalam pembangunan.
- c. Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi.
- d. Pengakuan kodrat yang harus tetap di lindungi serta harkat dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi

- a. Mental spiritual yang meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, warga masyarakat dan warga Negara yang bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Fisik materiil yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari, melalui peningkatan pendidikan pengetahuan dan keterampilan.

Dan dalam pelaksanaannya, tugas Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina program kerja PKK
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program PKK
- c. Membina bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada penggerak PKK setingkat di bawahnya.
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas Pembina PKK pada tingkat yang sama kepada Tim Penggerak PKK setingkat lebih atas.

Susunan Organisasi Tim Penggerak PKK, Tim penggerak PKK dibentuk disetiap jenjang pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, dan desa/ kelurahan memiliki garis pimpinan langsung ke bawah secara berjenjang.²² Dalam kegiatan PKK tak luput adanya pemberdayaan kaum perempuan tanpa melepas 10 Program Pokok dari PKK.

Dalam hal ini dapat dimaksudkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan 10 Program Pokok PKK dan perempuan sebagai motor penggerak, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan 10 Program Pokoknya merupakan wadah yang tepat untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan keluarga, baik lahir, bathin bagi seluruh rakyat Indonesia serta mempunyai arti penting bagi pembangunan bangsa.

Peran PKK Kabupaten Sarolangun dalam mengarahkan pada kehidupan bermasyarakat menuju kearah yang lebih baik, ada 10 Program Pokok PKK yang kesemuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, dalam hal ini penulis menitik beratkan penelitian pada bidang Kesehatan dan Keterampilan.

Pada bidang kesehatan organisasi PKK Kabupaten Sarolangun telah banyak mengarahkan kaum perempuan untuk peduli akan kesehatan baik untuk keluarga, masyarakat, dan sesama. Salah satu tujuan sistem kesehatan Nasional adalah terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat di Bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Peran Bantu PKK dalam membangun kesehatan ialah dengan memberikan motivasi kepada masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan menjaga kesehatan,

kesehatan keluarganya, dengan selalu mengunjungi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PKK, baik dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan. Dan organisasi PKK bekerja sama dengan pihak-pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), PKK Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Dalam upaya pemberian penyuluhan kesehatan secara rutin, dan hal yang dilaksanakan oleh PKK yaitu dengan melakukan:

- a. Sosialisasi tentang pentingnya kesehatan keluarga, yang dimotori dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan selalu menjaga kesehatan, baik lingkungan ataupun lingkungan keluarga.
- b. Penyuluhan tentang gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- c. Penyuluhan tentang Keluarga sadar Gizi dan Gizi Seimbang, dalam upaya perbaikan Gizi kegiatan yang dilaksanakan, sosialisasi pentingnya gizi dalam keluarga.
- d. Pembinaan Kualitas Posyandu dan Posyandu Lansia.
- e. Pelatihan Kader Posyandu.
- f. Penyuluhan Asi Eksklusif.
- g. Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahannya, terutama pada anak remaja.

Kegiatan PKK dalam bidang imunisasi adalah sebagai motivator yang membantu menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi bayi balita, anak sekolah, ibu hamil, calon penganten (Caten) dan Wanita Usia Subur (WUS) dengan cara memberikan penyuluhan terutama kepada kaum ibu.

i. Peran Bantu PKK Dalam Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan PKK dalam program Keluarga Berencana adalah bekerjasama dengan instansi terkait melaksanakan kegiatan.

Dalam hal ini kegiatan yang dicanangkan PKK sangat membantu pola perkembangan masyarakat, untuk lebih peduli akan arti kesehatan, pentingnya kesehatan keluarga, dan untuk lingkungan sekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang telah membawa arus perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, serta mengerti akan pentingnya arti kesehatan, dan program kegiatan PKK ini sangat berpengaruh besar kepada masyarakat, ini bukti salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan, yang mana organisasi PKK telah mengarahkan kepada kaum perempuan desa untuk selalu peduli akan kesehatan, dengan adanya tanggapan positif masyarakat dan kepedulian masyarakat, menjadi salah satu arus perbaikan yang lebih bagus, karena saat sekarang ini kaum perempuan desa tidak lagi hanya mementingkan urusan dapur semata namun telah mengarah keperbaikan mutu keluarga. Untuk memberikan semangat nyata kepada kaum ibu-ibu maka organisasi PKK memberikan

sertakan kaum perempuan, ibu-ibu untuk terlibat langsung sebagai peserta lomba Lingkungan bersih dan sehat, lomba posyandu dan balita, lomba Keluarga harmonis, lomba Institusi Masyarakat Pedesaan, senam lansia, baik tingkat provinsi atau wilayah. Dan ini adalah motivasi baru untuk para ibu-ibu bahwa kaum perempuan sekarang ini mampu menjadi yang terbaik tanpa harus berdiam diri di dalam rumah, dan bersosialisasi atau ikut serta dalam organisasi itu dapat membawa kaum perempuan tidak merasa terpinggirkan oleh kaum laki-laki, serta masyarakat terutama para ibu-ibu anggota PKK tingkat desa hingga di atasnya sekarang mampu menunjukkan perubahan itu, perubahan dimana pentingnya arti kesehatan bagi keluarga dan sesamanya. Dalam hal sosialisasi Kesehatan Tim Penggerak PKK terjun langsung di PKK tingkat desa, dan kecamatan dengan dibantu oleh kader-kader yang bersangkutan membantu sosialisasi tentang kesehatan.

Apabila jiwa dan raga kita sehat, maka dalam menjalani segala kegiatan tidak akan terhambat, setelah Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun menyanangkan dan mensosialisasikan pentingnya kesehatan, dan kegiatan tersebut telah disambut positif dan telah membawa banyak perubahan pada setiap anggota PKK desa dan setingkatnya dan mereka mampu melaksanakannya, dan ini adalah pemberdayaan perempuan yang sangat baik. Dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun tak lupa memberdayakan perempuan melalui jalur Keterampilan. Diharapkan

dalam menumbuhkan minat, bakat dan perilaku kreatif, inovatif, serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimana keterampilan sangat bermanfaat untuk masa depan, selain dapat menambah penghasilan untuk perorang dan menambah penghasilan ekonomi keluarga dan keterampilan juga mampu menambah penghasilan berkelompok, dalam hal ini keterampilan yang dikembangkan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun dalam hal memberikan penyuluhan kepada Desa/Kelurahan yang ada antara lain keterampilan Bordir, pembuatan keripik durian, pembuatan tas dari manik-manik, membuat bunga dari kulit jagung, Membatik dengan ciri corak motif Kabupaten Sarolangun yang sekarang ini baru mulai diangkat kepermukaan untuk mengenalkan batik tersebut untuk dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk saat ini pengembangan batik khas Kabupaten Sarolangun masih dikembangkan melalui organisasi PKK, dan untuk kedepannya agar mampu dikembang luaskan pada masyarakat Kabupaten Sarolangun, keterampilan Home Industri yang lain yaitu dengan membuat keterampilan mengembangkan makanan khas Kabupaten Sarolangun dan kerajinan membuat mainan dinding yang terbuat dari kayu, yang kemudian dibentuk atau di pahat menyerupai ikan-ikanan, kura-kura dll. Dalam hal pensosialisasian keterampilan tersebut Tim Penggerak PKK terjun langsung ke PKK desa

dan untuk memberikan penerangan cara membuat

keterampilan tersebut, baik dalam hal membatik dan membuat keterampilan dari kayu (Home Industri), hasil dari keterampilan tersebut, bisa dijual sendiri atau dapat dijual melalui koperasi, organisasi PKK Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan Disperindagkop, sebagai penyalur penjualan hasil kerajinan dan membatik dari anggota PKK tiap-tiap desa dan Kecamatan. Sebagian besar wanita atau kaum perempuan Kabupaten Sarolangun bekerja diladang, perkebunan bahkan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, namun untuk beberapa tahun kedepan ini kaum perempuan Kabupaten Sarolangun sudah mendapatkan kegiatan lain, dimana mereka tidak hanya terfokus untuk berladang, melainkan mereka sudah mempunyai kesibukan lain yang tak kalah menarik yaitu menjalankan keterampilan-keterampilan yang ditawarkan oleh PKK Kabupaten Sarolangun, seperti membuat kerajinan, membatik, dan membordir dan semua kegiatan ini dikerjakan sesuai dengan kemauan pada bidang mana mereka mampu menjalankannya. Selain itu dari pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh PKK Kabupaten Sarolangun telah banyak membawa nilai positif dan sangat berdayaguna bagi kaum perempuan, selain dapat menambah perekonomian keluarga, kegiatan ini juga mampu menambah pengetahuan para kaum perempuan

3. Pemberdayaan Perempuan

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 mengarahkan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan: *pertama* meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender, *kedua* meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai histories perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.²³

Gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia sebenarnya cukup memiliki akar kultural ditengah-tengah masyarakat. Sejak dulu kaum perempuan di Indonesia cenderung memiliki kelompok perkumpulan yang secara natural dapat dikatakan sebagai presiden sejarah gerakan pemberdayaan perempuan. Eksistensi gerakan tersebut, baik secara kultural, psikologis maupun organisatoris, hingga kini begitu nyata denyutnya. Bahkan dalam skala yang sangat mikro, setiap individu perempuan Indonesia selalu memiliki aktifitas diluar kegiatan domestik. Perempuan, dimana saja, pasti memiliki perkumpulan tertentu. Perkumpulan-perkumpulan tersebut jelas memberikan manfaat sosial, baik dalam masalah ekonomi, rohani, atau bahkan dalam masalah politik dimana perempuan menjadi pemasok suara.

Perkembangan mutakhir pemberdayaan perempuan di Indonesia terlihat dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peran yang sangat penting dalam memobilisasikan anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan, dan banyak sekali makna dalam pemberdayaan perempuan. Istilah pemberdayaan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Tetapi lebih dari sekedar hal yang berkaitan dengan ekonomi, pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan di segala aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurunkan kelompok etnik dan kelompok sosial. Pendekatan pemberdayaan pada intinya adalah berupaya untuk menghapuskan subordinasi perempuan, termasuk didalamnya adalah hak ekonomi, hak reproduktif dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif. Pendekatan ini dianggap tidak perlu menyibukkan diri dengan proyek pembangunan tetapi menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan. Bagaimana dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan meliputi segala aspek dalam kehidupan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan penting dalam langkah-langkah pemberdayaan tersebut. Dalam artian tidak ada

perempuan lebih disempitkan dalam upaya memperbaiki tingkat kehidupan. Pemberdayaan perempuan disini lebih kepada bagaimana mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar mempunyai akses dan kesempatan yang seimbang dalam kehidupannya, tidak kemudian pemberdayaan perempuan diartikan sebagai suatu hal yang 'memenangkan' perempuan dari kuasa laki-laki. Seimbang dan setara, kedua hal tersebut itu yang menjadi pokok dalam konsep pemberdayaan perempuan ini.²⁴

Pendampingan untuk pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya memperhatikan aspek ekonomi saja tetapi juga harus menyentuh aspek yang lain. Misal saja dalam bidang ekonomi perlu ditekankan pada pembukaan akses bagi kaum perempuan terhadap berbagai macam sumber daya. Masalah pemberdayaan perempuan, intinya bukan pada persoalan menang kalah antara jenis kelamin, tetapi lebih dari itu ada akses dan kesempatan yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Pemahaman lebih lanjut mengenai pemberdayaan menurut **Sutoro Eko** dalam bukunya *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2004:251-253, ada beberapa cara pandang, yaitu:

- a. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi dalam masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah *obyek* penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar

seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai *subyek* (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

- b. Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya pemenuhan kebutuhan (*need*) masyarakat.
- c. Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal sampai pada level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan *psikologis personal* berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan *struktural masyarakat* berarti menumbuhkan rasamemiliki, gotong-royong, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial, dan visi kolektif masyarakat.²⁶ Jadi dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial melalui proses belajar bersama dan berkelanjutan untuk membangkitkan potensi atau kemampuan, meningkatkan kesadaran politis, mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan control diri, memperkuat partisipasi, serta kemandirian perempuan-perempuan dimana diharapkan untuk memiliki kesempatan dan pekerjaan selaras atau setara dari haluan dan watak perempuan sesuai dengan fungsi-fungsi serta kodratnya.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan secara garis besar diuraikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 diantaranya adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan disamping masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan, adanya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, rendahnya kualitas perempuan dan anak, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka indeks pembangunan gender (*Gender Related Development Index, GID*) dan Angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Management, GEM*), masih adanya hukum dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk kesediaan data terpilih berdasarkan jenis kelamin. Kecermatan dan dicari solusinya, melalui upaya penyusunan kebijakan, pengiriman dan kegiatan pembangunan yang responsive gender melalui pengarusutamaam gender.²⁷

Pemberdayaan perempuan, kedudukan perempuan dan laki-laki dalam persektif perspektif islam adalah sama dan yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Namun demikian diakui atau tidak, mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang fair untuk tidak mengatakan sikap negative terhadap perempuan, yakni perempuan harus dibelakang laki-laki.

Pemahaman ternyata berakar dari teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak relevan dengan ayat 1 surat An-Nisa, yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang

sama. Dari sini jelas bahwa islam tidak monomer duakan perempuan. Laki-laki memang dibebani tanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan tidak. Namun hal itu justru menunjukkan kearifan Tuhan.

Kesalahan teologis diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan pada laki-laki dan perempuan seperti itu masih banyak terjadi di negara maju. Apalagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Tentu saja hal itu memprihatinkan sebab, jika dikaitkan dengan teologis islam jelas tidak sesuai karena islam menghargai hasil kerja perempuan, islam mendorong perempuan untuk bekerja dan berprofesi mulia.²⁸

Untuk mengejar ketertinggalannya dalam pemberdayaan perempuan tersebut pemerintah Indonesia berusaha dengan sangat serius sehingga pemerintah perlu membentuk kementerian yang bertugas mengurus dan membangun masalah pemberdayaan perempuan yang diberi nama kementerian urusan pemberdayaan perempuan di dalam kementerian tersebut telah dirumuskan tentang tujuan, permasalahan dan pemecahan masalah dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia pada khususnya sehingga rumusan yang telah digariskan dapat menjadi tolak ukur dan petunjuk pelaksanaan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan baik organisasi tersebut berada di bawah pemerintah maupun *Non Government Organization* (NGO).

Adapun rumusan – rumusan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (Kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan, Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang kehidupan.
- 2) Sasaran Umum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan diberbagai kegiatan sektor dan sub sektor serta lembaga dan non lembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan

kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender, mengarusutamakan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan-perempuan dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan.

- 3) Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan: Mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah pada semua sektor melalui kelembagan/wadah yang telah ada, Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah jejaring (*network*) untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan. Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independent untuk pemberdayaan perempuan baik dalam hal pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi.²⁹ Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan masih dirasakan perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan peran serta kaum perempuan dalam mengisi pembangunan antara lain : Sosialisasi/advokasi pengarusutamaan gender perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk

membangun kesepakatan pembangunan pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang dan sektor, meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk program, proyek maupun kegiatan rutin, pelaksanaan pelatihan/pendidikan analisa gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman untuk mengarusutamakan issue gender kedalam kebijakan program/perencanaan pembangunan, mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.³⁰

b. Pengertian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesetaraan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan

kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.³¹ Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki akses, kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan

4. Mekanisme kerja, faktor pendukung dan penghambat organisasi PKK Kabupaten Sarolangun

Organisasi PKK yang dipimpin oleh seorang ketua pelaksana. Dimana ketuanya tersebut mempunyai tugas-tugas tersendiri, yang nantinya dibantu oleh wakil ketua, serta pengurus yang lain baik pengurus dibawahnya yang sudah berada pada pemegang tanggungjawab masing-masing.

Pada awalnya mekanisme kerja di organisasi PKK cenderung fleksibel, disesuaikan dengan 10 program pokok PKK, dan sesuai dengan situasi dan kondisi, namun untuk sekarang sudah banyak program-program yang dilaksanakan tidak hanya terpakun pada 10 program pokok

PKK saja, namun sudah dapat berkembang dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat banyak, yang nantinya kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi kelangsungan bersama dengan tetap memberikan yang terbaik. Dan pada kegiatan PKK untuk saat ini tidak dirasakan kaku lagi, karena sudah banyak kegiatan yang mampu dilaksanakan dengan program-program baru sesuai dengan kebutuhan. Adanya pertanggungjawaban akan setiap bagian pelaksana kegiatan, atau bagian bidang-bidang kegiatan. Sehingga dalam kegiatannya dan pelaksanaannya dapat lebih teratur, laporan kegiatan jelas, proses pendampingan dapat diamati dengan baik dan sistematis, dokumentasi dan metodologi dapat di terangkan dengan baik.

Faktor penghambat berjalannya organisasi PKK:

- a. Masih adanya pengaruh budaya yang mengikat kaum perempuan
- b. Masih minimnya pengalaman anggota pengelola atau pengurus PKK, baik Desa dan Kecamatan yang mana masih perlu banyak belajar dalam pengelolaan manajemen kepengurusan organisasi

Faktor pendukung berjalannya organisasi PKK:

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
- b. Banyaknya kaum perempuan didaerah
- c. Adanya dukungan dari masyarakat luas pada umumnya.³²

F. Definisi Konseptional

Agar tidak terjadi kekaburan atau menghindari salah pengertian, maka perlu dijelaskan batasan dari konsep-konsep tersebut:

1. Peran

Adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok dalam pengambilan bagian dibidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai kedudukannya.

2. Organisasi PKK

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yaitu suatu gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.³³

3. Pemberdayaan Perempuan

Suatu proses perubahan sosial melalui proses belajar bersama dan berkelanjutan untuk membangkitkan potensi atau kemampuan, meningkatkan kesadaran politis, mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan control diri, memperkuat partisipasi, serta kemandirian perempuan-perempuan dimana

dari haluan dan watak perempuan sesuai dengan fungsi-fungsi serta kodratnya.

G. Definisi Operasional

Yang dimaksud definisi operasional dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kita melihat peran organisasi PKK dalam pemberdayaan perempuan.

1. Peran Organisasi PKK Dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan dan keterampilan meliputi:

a. Bidang kesehatan

1) Pembinaan Kesetaraan ber-KB

2) Kesehatan Keluarga dan lingkungan

b. Bidang Keterampilan

Peningkatan Keterampilan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga, meliputi bidang kegiatan: membordir, membatik, pangan, home industri, UP2K.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung organisasi PKK, dalam

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara utama dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, populasi, dan sample, serta jenis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong:³⁴

”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses ”

Metodologi deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁵ Hal ini juga disebabkan karena metode penelitian kualitatif deskriptif memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual, dan ia merupakan representatif obyektif terhadap fenomena yang tanggap.³⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek dari penelitian adalah Organisasi PKK di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 135.

³⁵ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 6.

³⁶ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 141.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisis pada penelitian ini difokuskan pada bidang kesehatan dan keterampilan dalam organisasi PKK di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul Peran Organisasi PKK dalam Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesehatan dan Keterampilan adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh langsung dari sumber data berupa keterangan-keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian.

Data sekunder merupakan data-data kepustakaan yang relevan yang bersumber dari buku-buku literatur, dokumentasi, dan sebagainya.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap, akurat serta ilmiah penyusun menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan

observasi peneliti mempunyai data yang riil tentang keadaan daerah yang diteliti dan memudahkan peneliti dalam mengolah data yang akan ditulis.

b. Interview / Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan pihak organisasi PKK serta dengan para narasumber yang terkait langsung dengan peran organisasi PKK yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan dan keterampilan.

Wawancara dengan Ibu Hj. Yusniana Hasan Basri, Selaku Ketua TP PKK Kabupaten Sarolangun, Nurlela Ahmad selaku Ketua Pokja II Bidang Pendidikan, Keterampilan, Pengembangan kehidupan berkoperasi, Ngadirah selaku anggota bidang keterampilan PKK Desa Pematang Kolim, Henayati selaku anggota yang mengikuti kegiatan keterampilan PKK Desa Pematang Kolim, Ibu Karsiem Selaku Pengurus PKK Desa Pematang Kolim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat yang berhubungan dengan penelitian atau Koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian.³⁷ Dokumentasi yang diambil dari arsip-arsip mengenai program kerja PKK yang telah dilaksanakan.

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan sumber data yang ada di kantor PKK, karena metode ini sangat berguna membantu interview dan observasi. Selain itu dengan metode dokumentasi ini, akan diperoleh data yang sebenarnya tentang masalah yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diuraikan secara deskriptif, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan hitungan statistik. Jadi dengan analisis data, maka akan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam proses analisis data Moleong adalah analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁸